

KTT Luar Biasa Liga Arab dan OKI di Riyadh 2024

Upaya terbaru untuk memperkuat solidaritas Dunia Islam terhadap isu Palestina.

Solidaritas Dunia Islam

Faktor krusial dalam menghadapi tekanan eksternal terkait isu Palestina.

Penghalang Solidaritas

Perbedaan ideologi, kepentingan politik, dan aliansi internasional.



Diplomasi Multilateral Dunia Islam Menuju Perdamaian Palestina

– Danial Darwis

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu isu geopolitik yang paling kompleks dan berlarut-larut di Timur Tengah, dengan dampak signifikan terhadap stabilitas kawasan.

Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, wilayah Palestina telah mengalami pendudukan, pengusiran, dan penindasan sistematis yang terus berlanjut hingga saat ini. Tindakan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat, blokade Jalur Gaza, serta pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia telah menjadi karakter utama konflik ini. Selain itu, eskalasi kekerasan di Yerusalem Timur, khususnya di sekitar Masjid Al-Aqsa, memperburuk ketegangan antara Israel dan Palestina. Konflik ini tidak hanya memengaruhi hubungan bilateral kedua pihak, tetapi juga memicu respons dari komunitas internasional, termasuk negara-negara Muslim. Dengan keterlibatan aktor

regional dan internasional, konflik ini menjadi pusat dari perselisihan politik dan ideologis yang lebih luas. Sebagai isu lintas batas, konflik Israel-Palestina juga memiliki implikasi terhadap hubungan diplomasi di kawasan Timur Tengah dan di dunia pada umumnya.

Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memiliki peran historis dalam mendukung perjuangan Palestina sejak pembentukannya. Liga Arab, yang didirikan pada tahun 1945, menjadikan isu Palestina sebagai prioritas utama dalam kebijakan kolektifnya. Resolusi-resolusi Liga Arab sering kali berfokus pada penghentian pendudukan Israel, pengakuan hak-hak Palestina, dan dukungan terhadap kemerdekaan mereka. OKI, yang didirikan pada tahun 1969 setelah pembakaran Masjid Al-Aqsa, juga memiliki mandat serupa, dengan fokus pada solidaritas Muslim dan advokasi atas hak-hak rakyat Palestina. Kedua organisasi ini secara konsisten menjadi forum untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina dalam berbagai *platform* internasional. Meski demikian, efektivitas langkah-langkah diplomasi kedua organisasi sering kali terkendala oleh perpecahan internal di antara negara-negara anggotanya. KTT Luar Biasa Liga Arab dan OKI di Riyadh 2024 menjadi salah satu upaya terbaru untuk memperkuat solidaritas Dunia Islam terhadap isu Palestina.

Tujuan utama KTT di Riyadh adalah menciptakan konsensus di antara negara-negara Muslim dalam menghadapi krisis Palestina, sekaligus merespons eskalasi kekerasan terbaru di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, KTT berupaya memperkuat peran diplomasi multilateral dunia Islam dalam mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan damai dan kolektif. Selain itu, forum ini berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat posisi Dunia Islam di panggung internasional, terutama dalam upaya memobilisasi dukungan global terhadap Palestina. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menyatukan pandangan negara-negara anggota yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang berbeda. Perbedaan ini sering kali menghambat langkah konkret yang diperlukan untuk menekan Israel secara efektif. Meski demikian, KTT ini mencerminkan pentingnya solidaritas Dunia Islam dalam menyikapi isu-isu global menyangkut hak-hak umat Muslim.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hasil KTT Luar Biasa Liga Arab dan OKI, termasuk deklarasi bersama, rekomendasi strategis, dan respons negara-negara anggota terhadap isu Palestina. Selain itu, tulisan ini juga mengevaluasi tantangan yang dihadapi diplomasi multilateral Dunia Islam, baik dari segi internal maupun eksternal. Analisis ini mencakup peran organisasi seperti Liga Arab dan OKI dalam memobilisasi dukungan internasional serta implikasi keputusan KTT terhadap dinamika geopolitik di Timur Tengah. Dengan pendekatan ini, tulisan ini tidak hanya menyoroti signifikansi KTT Riyadh, tetapi juga mengkaji prospek keberhasilan diplomasi Dunia Islam di masa depan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang diplomasi multilateral ini, diharapkan dapat diidentifikasi peluang dan tantangan dalam memperjuangkan perdamaian yang berkeadilan bagi rakyat Palestina.

Latar Belakang Konflik Israel-Palestina

Konflik Israel-Palestina berakar pada tahun 1948 ketika Israel memproklamasikan kemerdekaannya, yang ditentang oleh negara-negara Arab tetangga dan penduduk Arab Palestina. Setelah Perang Arab-Israel 1948, Israel berhasil menguasai wilayah yang lebih luas dari yang dialokasikan oleh Resolusi PBB 181, menyebabkan ratusan ribu warga Palestina menjadi pengungsi (Kumpanan, 2021). Pendudukan ini diperparah oleh Perang Enam Hari pada tahun 1967 dimana Israel merebut Jalur Gaza, Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan (Arsika, 2024). Sejak saat itu, perluasan permukiman ilegal di wilayah pendudukan dan kebijakan diskriminatif terhadap warga Palestina terus berlanjut. Situasi ini menciptakan ketegangan yang berkelanjutan antara kedua belah pihak. Upaya diplomatik dan resolusi internasional sering kali gagal menghentikan pendudukan dan kekerasan yang terjadi.

Hingga tahun 2024, konflik Israel-Palestina mengalami eskalasi signifikan, terutama di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem. Operasi genosida yang dilakukan Zionis Israel di Jalur Gaza, dan kemudian meluas ke Tepi Barat serta Lebanon, dilakukan dari berbagai macam arah, baik dari darat, udara, dan laut, hingga berakibat pada munculnya puluhan ribu korban di Gaza (41.689 orang syahid dan 96.625 orang luka-luka), sebagian besar dari mereka adalah warga sipil yang terdiri dari perempuan dan anak-anak (Tsani, 2024). Di Tepi Barat, peningkatan kekerasan antara pemukim Israel dan warga Palestina memperburuk situasi keamanan. Yerusalem tetap menjadi titik panas, dengan bentrokan yang sering terjadi di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa. Selain itu, pembangunan koridor baru

oleh Israel di Gaza Utara memicu kekhawatiran akan fragmentasi wilayah lebih lanjut (Prasetyo & Retno W, 2024). Kondisi ini memperparah penderitaan warga sipil dan meningkatkan ketegangan regional.

Upaya diplomasi internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina telah dilakukan melalui berbagai inisiatif, termasuk perundingan damai dan resolusi PBB. Namun, hingga kini, solusi yang komprehensif belum tercapai. Perjanjian Oslo pada 1990-an memberikan harapan, tetapi implementasinya terhambat oleh ketidakpercayaan dan pelanggaran kesepakatan oleh kedua belah pihak. Selain itu, peran mediator internasional sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik masing-masing negara, yang mengurangi efektivitas proses perdamaian. Kegagalan ini menyebabkan skeptisisme di kalangan masyarakat internasional dan pihak-pihak yang terlibat. Akibatnya, konflik terus berlanjut tanpa solusi yang jelas.

Kegagalan diplomasi internasional dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina juga disebabkan oleh dinamika politik internal di kedua belah pihak. Di pihak Palestina, perpecahan antara faksi-faksi politik, seperti Fatah dan Hamas, menghambat pembentukan front persatuan dalam negosiasi. Sementara itu, di Israel, perubahan pemerintahan dan kebijakan yang fluktuatif terhadap proses perdamaian menciptakan ketidakpastian. Selain itu, perluasan permukiman ilegal di wilayah pendudukan oleh Israel terus berlanjut, meskipun ada kecaman internasional. Faktor-faktor ini menambah kompleksitas dalam mencapai solusi damai yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih inklusif dan komprehensif untuk mencapai perdamaian di wilayah tersebut.

Penyelenggaraan KTT Luar Biasa Liga Arab dan OKI

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh pada November 2024 diadakan sebagai respons terhadap eskalasi kekerasan yang signifikan di Gaza dan Yerusalem, bahkan melebar hingga ke Beirut, Lebanon. Serangan militer Israel di Gaza menyebabkan korban jiwa dan kerusakan yang sangat parah di wilayah tersebut, upaya gencatan senjata antara Israel dan Hamas gagal sehingga pertempuran terus berlanjut (Reditya, 2024). Sementara ketegangan di Yerusalem, khususnya di sekitar Masjid Al-Aqsa memicu protes massal dan bentrokan antara warga Palestina dan pasukan keamanan Israel. Selanjutnya, serangan meluas hingga ke Beirut, Lebanon, terjadi ledakan besar di pinggiran selatan, Israel mengatakan bahwa mereka menyerang fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah (Detiknews, 2024). Situasi tersebut menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan negara-negara Muslim, mendorong kebutuhan akan tindakan kolektif untuk menghentikan agresi dan mendukung rakyat Palestina, serta mencegah konflik yang lebih meluas. Selain itu, perpindahan paksa penduduk Palestina dan perluasan permukiman ilegal oleh Israel semakin memperburuk keadaan di wilayah pendudukan. Organisasi hak asasi manusia Israel, B'Tselem, pernah menyatakan bahwa pemindahan paksa warga Palestina dari wilayah pendudukan merupakan kejahatan perang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Suara Palestina News Agency, 2021). Kondisi kemanusiaan yang memburuk di wilayah pendudukan menuntut respons segera dari komunitas internasional. Dalam konteks inilah, KTT Luar Biasa ini diselenggarakan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi krisis yang berkembang.

Tujuan utama KTT ini adalah menyatukan sikap negara-negara Muslim terhadap tindakan Israel di wilayah Palestina. Negara-negara anggota Liga Arab dan OKI berupaya membangun konsensus untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya dan mematuhi hukum internasional. Selain itu, KTT bertujuan memperkuat solidaritas di antara negara-negara Muslim dalam mendukung perjuangan Palestina. Melalui pendekatan diplomasi multilateral, diharapkan dapat dibentuk strategi bersama yang efektif. KTT ini juga berfungsi sebagai platform untuk menyampaikan pesan tegas kepada komunitas internasional mengenai posisi dunia Islam terkait konflik tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan tekanan global terhadap Israel untuk menghentikan tindakannya.

KTT dihadiri oleh negara-negara anggota Liga Arab dan OKI, dengan Arab Saudi memainkan peran sentral sebagai tuan rumah. Kehadiran para pemimpin dan perwakilan dari berbagai negara Muslim menunjukkan komitmen kolektif dalam menyikapi krisis Palestina. Selain itu, partisipasi negara-negara dengan pengaruh signifikan di kawasan, seperti Mesir, Turki, dan Iran, menambah bobot diplomatis pertemuan ini. Keterlibatan Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, juga memberikan kontribusi penting dalam

diskusi (Pramana, 2024). Kehadiran berbagai organisasi internasional dan regional menegaskan pentingnya isu yang dibahas. Dengan demikian, KTT ini mencerminkan upaya bersama untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.

Agenda utama KTT meliputi seruan penghentian pendudukan Israel, penguatan dukungan terhadap Palestina, dan usulan aksi kolektif dari negara-negara Muslim. Para peserta membahas langkah-langkah konkret untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya dan mematuhi resolusi internasional. Selain itu, dibahas pula strategi untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan dan dukungan politik kepada Palestina. Usulan untuk memutuskan hubungan diplomatic dan ekonomi dengan Israel menjadi salah satu topik yang dipertimbangkan (Wardah, 2024). KTT juga menekankan pentingnya peran komunitas internasional dalam menyelesaikan konflik ini. Dengan demikian, diharapkan dapat dibentuk mekanisme yang efektif untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Keputusan dan Pernyataan Bersama

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang diadakan di Riyadh pada November 2024, para pemimpin negara-negara Muslim mengeluarkan Deklarasi Riyadh yang menegaskan penolakan tegas terhadap pendudukan Israel di semua wilayah Palestina (UNA-OIC, 2024). Mereka menekankan bahwa tindakan pendudukan tersebut melanggar hukum internasional dan Hak Asasi Manusia rakyat Palestina (Naufa, 2023). Deklarasi ini juga menyoroti pentingnya penghentian segera semua aktivitas permukiman ilegal yang dilakukan oleh Israel di wilayah pendudukan (UNA-OIC, 2024). Para pemimpin sepakat bahwa pendudukan yang berkelanjutan menghambat upaya perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah (Naufa, 2023). Selain itu, mereka menuntut agar Israel menghormati batas-batas yang diakui secara internasional sebelum tahun 1967 (UNA-OIC, 2024). Deklarasi Riyadh mencerminkan solidaritas Dunia Islam dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan penuh (Naufa, 2023).

Selain itu, Deklarasi Riyadh menyatakan dukungan penuh terhadap solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina (UNA-OIC, 2024). Para pemimpin menegaskan bahwa solusi ini merupakan jalan terbaik untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan antara Israel dan Palestina (Naufa, 2023). Mereka menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendukung upaya ini dan menekan Israel agar mematuhi resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan (UNA-OIC, 2024). Deklarasi ini juga menekankan pentingnya menjaga *status quo* Yerusalem dan menghormati tempat-tempat suci yang ada di kota tersebut (Naufa, 2023). Para pemimpin menolak segala upaya yang bertujuan mengubah demografi dan status hukum Yerusalem (UNA-OIC, 2024). Dukungan terhadap solusi dua negara ini menunjukkan komitmen negara-negara Muslim untuk mencapai perdamaian yang komprehensif di kawasan (Naufa, 2023).

Deklarasi Riyadh juga berisi seruan untuk menghentikan semua hubungan ekonomi dan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk tekanan agar negara tersebut menghentikan pendudukannya di Palestina (UNA-OIC, 2024). Langkah ini dimaksudkan untuk mengisolasi Israel secara internasional dan memaksanya mematuhi hukum internasional (Naufa, 2023). Beberapa negara anggota OKI dan Liga Arab yang sebelumnya telah menormalisasi hubungan dengan Israel diharapkan meninjau kembali keputusan mereka (UNA-OIC, 2024). Namun, implementasi seruan ini menghadapi tantangan, mengingat adanya kepentingan nasional dan regional yang berbeda di antara negara-negara anggota (Naufa, 2023). Meskipun demikian, seruan ini mencerminkan upaya kolektif untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel (UNA-OIC, 2024). Para pemimpin berharap bahwa langkah ini akan mendorong Israel untuk terlibat dalam proses perdamaian yang sejati (Naufa, 2023).

Dalam rangka mendukung implementasi keputusan tersebut, para peserta KTT merekomendasikan pembentukan koalisi internasional untuk mendukung Palestina (UNA-OIC, 2024). Koalisi ini bertujuan mengkoordinasikan upaya negara-negara Muslim dalam memberikan bantuan finansial, politik, dan diplomatik kepada Palestina (Naufa, 2023). Selain itu, diusulkan penguatan kerja sama antarnegara Muslim dalam bidang ekonomi dan diplomasi untuk melawan tekanan Israel (UNA-OIC, 2024). Langkah-langkah ini mencakup peningkatan perdagangan intra-negara Muslim dan pembentukan aliansi politik di forum internasional (Naufa, 2023). Para pemimpin juga menekankan pentingnya mobilisasi sumber daya untuk rekonstruksi wilayah Palestina yang terdampak konflik (UNA-OIC, 2024).

Rekomendasi ini mencerminkan komitmen negara-negara Muslim untuk mengambil peran aktif dalam mendukung perjuangan Palestina (Naufa, 2023).

Analisis Kritis Diplomasi Multilateral Dunia Islam

Diplomasi multilateral Dunia Islam telah menunjukkan keberhasilan melalui konsensus negara-negara Muslim dalam mendukung Palestina. Hal ini tercermin dalam berbagai pertemuan internasional, seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh pada November 2024 dimana para pemimpin negara-negara Muslim sepakat mengecam agresi Israel terhadap Jalur Gaza dan menyatakan dukungan penuh bagi perjuangan Palestina (Mustaqim, 2023). Selain itu, negara-negara Muslim aktif memobilisasi dukungan internasional melalui media dan diplomasi publik untuk meningkatkan kesadaran global mengenai penderitaan rakyat Palestina. Upaya ini berhasil menarik simpati dan dukungan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Konsensus semacam ini memperkuat posisi Palestina dalam forum internasional dan menegaskan solidaritas dunia Islam terhadap perjuangan mereka.

Namun, diplomasi multilateral Dunia Islam juga menghadapi tantangan internal yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah ketegangan antara negara-negara Muslim terkait hubungan bilateral dengan Israel. Beberapa negara, seperti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Maroko, telah menormalisasi hubungan dengan Israel, yang memicu perdebatan di kalangan negara-negara Muslim lainnya (CNN Indonesia, 2023). Normalisasi ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina (Yulianingsih, 2020). Selain itu, perbedaan pendekatan politik di antara negara-negara anggota OKI dan Liga Arab semakin memperumit upaya mencapai kesepakatan bersama. Kepentingan nasional yang beragam dan dinamika politik domestik masing-masing negara sering kali menghambat tercapainya konsensus yang solid.

Tantangan eksternal juga menjadi hambatan dalam diplomasi multilateral Dunia Islam terkait isu Palestina. Tekanan dari negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, terhadap negara-negara yang ingin memutuskan hubungan dengan Israel, menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan politik negara-negara Muslim (Winata, 2024). Ketergantungan ekonomi dan militer beberapa negara Muslim terhadap negara-negara Barat membuat mereka enggan mengambil langkah yang dapat merugikan hubungan strategis tersebut. Selain itu, minimnya kekuatan eksekusi keputusan KTT dalam tatanan global menyebabkan rekomendasi yang dihasilkan sering kali tidak efektif dalam mengubah situasi di lapangan. Keterbatasan ini mengurangi dampak nyata dari diplomasi multilateral Dunia Islam dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

Untuk meningkatkan efektivitas diplomasi multilateral, diperlukan upaya memperkuat solidaritas dan koordinasi di antara negara-negara Muslim. Pendekatan yang lebih inklusif dan penghormatan terhadap perbedaan politik dapat membantu mengatasi tantangan internal. Selain itu, diversifikasi hubungan internasional dan pengurangan ketergantungan pada negara-negara Barat dapat memberikan ruang bagi negara-negara Muslim untuk mengambil keputusan yang lebih mandiri dalam mendukung Palestina. Peningkatan peran organisasi internasional seperti OKI dalam mediasi dan advokasi juga penting untuk memperkuat posisi diplomasi Dunia Islam di kancah global. Dengan demikian, diplomasi multilateral dunia Islam dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.

Implikasi Keputusan terhadap Hubungan Internasional

Keputusan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh pada November 2024 memperkuat solidaritas antarnegara Muslim dalam mendukung Palestina (UNA-OIC, 2024). Namun, keputusan ini juga menimbulkan risiko fragmentasi di kalangan negara-negara yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko (DW, 2020). Normalisasi hubungan tersebut sebelumnya dianggap sebagai langkah strategis untuk mencapai stabilitas regional, tetapi kini dipertanyakan kembali dalam konteks solidaritas Islam terhadap Palestina. Beberapa negara mungkin menghadapi dilema antara mempertahankan hubungan diplomatik dengan Israel dan menunjukkan komitmen terhadap keputusan KTT. Situasi ini dapat mempengaruhi dinamika politik internal dan hubungan bilateral di antara negara-negara Muslim. Oleh karena itu, diperlukan diplomasi yang hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan solidaritas Islam.

Keputusan KTT juga menimbulkan reaksi beragam dari negara-negara Barat. Beberapa negara mendukung solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian antara Israel dan Palestina (Nuafa, 2023). Namun, mayoritas negara Barat, terutama Amerika Serikat, tetap menunjukkan dukungan kuat terhadap Israel (Nursalikhah, 2021). Hal ini mencerminkan kompleksitas politik internasional di mana kepentingan strategis dan aliansi historis memainkan peran penting. Tekanan dari negara-negara Barat terhadap negara-negara Muslim yang mempertimbangkan pemutusan hubungan dengan Israel dapat mempengaruhi implementasi keputusan KTT. Selain itu, perbedaan sikap antara negara-negara Barat dan dunia Islam dapat memperumit upaya mencapai konsensus internasional mengenai penyelesaian konflik Palestina-Israel.

Keputusan KTT berpotensi mengubah dinamika politik di Timur Tengah, terutama terkait peran Iran, Turki, dan Arab Saudi sebagai kekuatan utama di kawasan tersebut. Iran, yang secara konsisten mendukung perjuangan Palestina, mungkin melihat keputusan KTT sebagai peluang untuk memperkuat posisinya dalam Dunia Islam. Turki, dengan ambisi regionalnya, dapat memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah. Sementara itu, Arab Saudi, sebagai tuan rumah KTT, berupaya menegaskan kepemimpinannya dalam isu-isu Dunia Islam. Persaingan dan kerja sama antara ketiga negara ini akan memainkan peran penting dalam menentukan arah politik regional pasca-KTT. Dinamika ini juga akan mempengaruhi hubungan mereka dengan negara-negara lain di kawasan dan komunitas internasional secara lebih luas.

Secara keseluruhan, keputusan KTT Luar Biasa Liga Arab dan OKI di Riyadh memiliki implikasi signifikan terhadap hubungan internasional. Di satu sisi, keputusan tersebut memperkuat solidaritas Dunia Islam dalam mendukung Palestina. Di sisi lain, tantangan internal dan eksternal muncul sehingga menuntut diplomasi yang cermat serta strategis. Negara-negara Muslim perlu menavigasi kompleksitas hubungan dengan Barat dan dinamika politik regional untuk memastikan bahwa keputusan KTT dapat diimplementasikan secara efektif. Selain itu, upaya untuk mencapai solusi damai dan berkelanjutan bagi konflik Palestina-Israel memerlukan keterlibatan konstruktif dari semua pihak terkait. Dengan demikian, keputusan KTT ini dapat menjadi langkah penting menuju perdamaian, asalkan diikuti dengan tindakan nyata dan kerja sama internasional yang solid.

Masa Depan Diplomasi Dunia Islam

Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memiliki peran strategis dalam membangun institusi bersama guna memperkuat diplomasi multilateral di dunia Islam. Melalui kerja sama yang terstruktur, kedua organisasi ini dapat mengoordinasikan respons terhadap isu-isu global yang mempengaruhi negara-negara Muslim, termasuk konflik Palestina-Israel. Pembentukan mekanisme diplomatik yang efektif memungkinkan penyampaian suara kolektif Dunia Islam di forum internasional. Selain itu, institusi bersama dapat berfungsi sebagai platform untuk mediasi dan penyelesaian konflik internal di antara negara-negara anggota. Upaya ini sejalan dengan mandat OKI dalam menyelesaikan konflik melalui diplomasi multilateral (Pahlevi, 2022). Dengan demikian, penguatan institusi bersama menjadi langkah penting dalam meningkatkan peran diplomasi Dunia Islam di kancah global.

Penguatan kapasitas ekonomi negara-negara Muslim merupakan elemen kunci dalam mendukung perjuangan Palestina. Dengan ekonomi yang kuat, negara-negara Muslim dapat memberikan bantuan finansial yang signifikan untuk rekonstruksi dan pembangunan di wilayah Palestina. Selain itu, kerja sama ekonomi antarnegara Muslim dapat menciptakan ketergantungan ekonomi internal, mengurangi ketergantungan pada negara-negara non-Muslim yang mungkin memiliki agenda politik berbeda. Inisiatif seperti pembentukan zona perdagangan bebas atau bank pembangunan Islam dapat menjadi instrumen efektif dalam hal ini. Langkah-langkah ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan umum di Dunia Islam, menciptakan stabilitas yang lebih besar. Sebagaimana disampaikan dalam KTT OKI-Liga Arab, pentingnya tindakan nyata dalam mendukung Palestina menjadi sorotan utama (Huda, 2024). Oleh karena itu, penguatan kapasitas ekonomi menjadi prioritas dalam agenda diplomasi dunia Islam.

Prospek implementasi keputusan KTT menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Meskipun terdapat komitmen kolektif, perbedaan kepentingan nasional dan dinamika politik domestik di antara negara-negara anggota dapat menghambat pelaksanaan keputusan bersama. Selain itu, tekanan dari aktor internasional yang memiliki kepentingan berbeda, seperti negara-negara Barat, dapat mempengaruhi konsistensi implementasi.

Sebagai contoh, dukungan militer dan politik Amerika Serikat terhadap Israel sering kali menjadi hambatan dalam upaya diplomatik Dunia Islam (Awal, 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang adaptif dan diplomasi yang cerdas untuk mengatasi tantangan ini. Evaluasi berkala dan mekanisme akuntabilitas juga penting untuk memastikan bahwa keputusan KTT dapat diimplementasikan secara efektif.

Solidaritas internal di Dunia Islam menjadi faktor krusial dalam menghadapi tekanan eksternal terkait isu Palestina. Persatuan di antara negara-negara Muslim akan memperkuat posisi tawar dalam diplomasi internasional dan memberikan dukungan moral bagi rakyat Palestina. Namun, perbedaan ideologi, kepentingan politik, dan aliansi internasional sering kali menjadi penghalang bagi solidaritas ini. Sebagai contoh, normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel menimbulkan perdebatan di kalangan negara-negara Muslim (DW, 2020). Untuk itu, dialog internal yang konstruktif dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi kunci dalam membangun solidaritas. Inisiatif seperti KTT OKI-Liga Arab dapat menjadi *platform* untuk memperkuat persatuan dan merumuskan strategi bersama. Dengan demikian, Dunia Islam dapat lebih efektif dalam menghadapi tekanan eksternal dan mendukung perjuangan Palestina. 

“ ”

Solidaritas internal di Dunia Islam menjadi faktor krusial dalam menghadapi tekanan eksternal terkait isu Palestina. Persatuan di antara negara-negara Muslim akan memperkuat posisi tawar dalam diplomasi internasional dan memberikan dukungan moral bagi rakyat Palestina.

– Danial Darwis

Daftar Rujukan

- Arsika, M. P. (2024, Oktober 6). Sejarah konflik Israel dan Palestina sejak 1948. *Detiksumbagsel*. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7573865/sejarah-konflik-israel-dan-palestina-sejak-1948>
- Awal, R. (2024, November 12). Menyikapi KTT Liga Arab: Tak perlu lagi resolusi, Persatuan kirim militer adalah solusinya. *Mazayapost.com*. <https://www.mazayapost.com/opini-suara-pembaca/menyikapi-ktt-liga-arab-tak-perlu-lagi-resolusi-persatuan-kirim-militer-adalah-solusinya/>
- CNN Indonesia. (2023, Februari 3). *Israel Resmi Normalisasi Hubungan dengan Negara Arab Keempat*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230203090945-120-908408/israel-resmi-normalisasi-hubungan-dengan-negara-arab-keempat>
- Detik News. (2024, Oktober 7). *Serangan Israel hantam Gaza-Beirut, Satu tahun usai serangan 7 Oktober*. <https://news.detik.com/bbc-world/d-7576391/serangan-israel-hantam-gaza-beirut-satu-tahun-usai-serangan-7-oktober?>
- DW. (2020, Desember 11). *Israel-Maroko sepakati normalisasi hubungan*. <https://www.dw.com/id/israel-maroko-sepakati-normalisasi-hubungan/a-55901284>
- Huda, M. A. (2024, November 11). RI desak OKI dan Liga Arab berbuat nyata untuk Palestina, tak sekadar omong kosong. *Republika.co.id*. <https://news.republika.co.id/berita/smrzt7487/ri-desak-oki-dan-liga-arab-berbuat-nyata-untuk-palestina-tak-sekadar-omonomon>
- Kumparan News. (2021, Mei 19). *Sejarah pendudukan Israel di tanah Palestina*. <https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-pendudukan-israel-di-tanah-palestina-1vm5AnE5Myp>
- Mustaqim, A. H. (2023, November 12). 20 kesepakatan dalam KTT Islam-Arab, dari embargo senjata ke Israel hingga bantuan kemanusiaan. *Sindonews.com*. <https://international.sindonews.com/read/1249397/43/20-kesepakatan-dalam-ktt-islam-arab-dari-embargo-senjata-ke-israel-hingga-bantuan-kemanusiaan-1699758690>
- Naufa, A. (2023, November 13). Hasil KTT OKI dan Liga Arab di Riyadh tentang perang Israel-Palestina. *NU Online*. <https://nu.or.id/internasional/hasil-ktt-oki-dan-liga-arab-di-riyadh-tentang-perang-israel-palestina-lyc5T>
- Nursalikah, A. (2021, September 20). AS ajak lebih banyak negara Arab normalisasi hubungan Israel. *Republika.co.id*. <https://khazanah.republika.co.id/berita/qzpw2366/as-ajak-lebih-banyak-negara-arab-normalisasi-hubungan-israel>
- Pahlevi, M. (2022). *Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam menangani konflik Palestina dan Israel*. https://www.researchgate.net/publication/365354325_Peran_Organisasi_Kerjasama_Islam_OKI_Dalam_Menangani_Konflik_Palestina_Dan_Israel/

- Pramana, A. (2024, November 17). [FULL] Pidato Wamenlu Anis Matta Berbahasa Arab di KTT Luar Biasa OKI: Soroti Kemerdekaan Palestina. *Kompas TV*. <https://www.kompas.tv/internasional/553904/full-pidato-wamenlu-anis-matta-berbahasa-arab-di-ktt-luar-biasa-ok-soroti-kemerdekaan-palestina>
- Prasetyo, F., & Retno W, P. (2024, Desember 26). Israel ubah jalan di Gaza jadi koridor baru mirip Netzarim, Gaza dipecah jadi 3 bagian. *Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/internasional/2024/12/26/israel-ubah-jalan-di-gaza-jadi-koridor-baru-mirip-netzarim-gaza-dipecah-jadi-3-bagian>
- Reditya, T. H. (2024, November 2). Gencatan senjata gagal, Israel dan Hamas terus bertempur. *Kompas.com*. <https://internasional.kompas.com/read/2024/11/02/060018370/gencatan-senjata-gagal-israel-dan-hamas-terus-bertempur?>
- Suara Palestina News Agency. (2021, November 5). *Beginilah Tepi Barat Palestina dibagi berdasarkan perjanjian Oslo*. <https://suarapalestina.com/post/12419/beginilah-tepi-barat-palestina-dibagi-berdasarkan-perjanjian-oslo>
- Tsani, A. F. (2024, Oktober 8). Satu tahun badai Al-Aqsa: Membuka mata dunia. *Minanews.net*. <https://minanews.net/satu-tahun-badai-al-aqsa-mengubah-mata-dunia/>
- UNA-OIC. (2024, November 11). *Penerbitan keputusan KTT Luar Biasa Arab dan Islam*. <https://una-oic.org/id/semua/2024/11/11/Keputusan-tersebut-dikeluarkan-oleh-KTT-Arab-dan-Islam/>
- Wardah, F. (2024, November 11). Di KTT OKI dan Liga Arab Indonesia serukan Israel dikeluarkan dari PBB. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/di-ktt-ok-s-dan-liga-arab-indonesia-serukan-israel-dikeluarkan-dari-pbb/7861292.html>
- Winata, D. K. (2024, Desember 20). Penyebab negara-negara Muslim tidak bersatu atasi isu Palestina. *Mediaindonesia.com*. <https://mediaindonesia.com/internasional/727948/penyebab-negara-negara-muslim-tidak-bersatu-atasi-isu-palestina>
- Yulianingsih, T. (2020, Agustus 28). Normalisasi hubungan diplomatik Israel dan UEA, Pengkhianatan untuk Palestina?. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/global/read/4333516/headline-normalisasi-hubungan-diplomatik-israel-dan-uea-pengkhianatan-untuk-palestina>

Foto: AFP/PPO/THAER GHANAIM/KOMPAS



The Insiera Insight (In-Insight)

Sebuah media digital yang diterbitkan sebulan sekali, memuat opini para anggota Insiera (The Indonesian Islamic Studies and International Relations Association). In-insight menyajikan analisis tajam terkait fenomena hubungan internasional terkini dari sudut pandang akademik melalui sumber-sumber kajian yang terpercaya, sesuai kredo; "Beropini dengan Cerdas dan Bernas." Pemimpin Redaksi: Muhammad Qobidl 'Ainul Arif Redaktur: Rudi Candra, Hasbi Aswar, Prihandono Wibowo, Gustri Eni Putri, Siti Muslikhati, Surwandono, Syaiful Anam, Rizky Hikmawan, Gonda Yumitro. Layouter: Hesti Eka Denata. Distribusi: Fadhlán Nur Hakiem.

Biografi Penulis

Danial Darwis



Danial adalah dosen tetap di Program Studi Hubungan Internasional, Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Indonesia. Menamatkan pendidikan sarjana pada Program Studi Ilmu Politik, FISIP, UNHAS dan pendidikan Magister pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UGM. Saat ini sedang menempuh Program Doktor pada Program Doktor Politik Islam – Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejak September 2023. Minat kajiannya antara lain meliputi, Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Politik Internasional, Kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah, serta Politik Islam. Beliau dapat dihubungi melalui e-mail: danial.darwis@gmail.com; atau danial.darwis@fisip.uncen.ac.id.